

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN DI KECAMATAN CISITU KABUPATEN SUMEDANG

Yati Cahyati¹, Josy Adiwisastra², Pandji Santosa³
yaticahyati1986@gmail.com¹, josy.adiwisastra@yahoo.com², pandjisantosa@gmail.com³
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan keluarga berencana pascapersalinan di Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan, mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi selama pelaksanaannya, serta mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan pelayanan keluarga berencana pascapersalinan. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada model-model implementasi kebijakan publik, dengan pendekatan metodologi kualitatif melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini meliputi tenaga kesehatan, petugas keluarga berencana, kader masyarakat, dan akseptor KB pascapersalinan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan akses layanan, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya tenaga terlatih, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Meskipun demikian, dukungan pemerintah dan peran aktif penyuluh KB memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan keluarga berencana pascapersalinan telah diterapkan dan menunjukkan potensi, penanganan terhadap hambatan-hambatan yang ada sangat penting untuk mencapai cakupan yang lebih luas dan pelayanan yang lebih efektif. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan edukasi masyarakat, peningkatan alokasi sumber daya, serta penguatan kerja sama antar lembaga untuk mendorong peningkatan partisipasi dan keberlanjutan pelayanan KB pascapersalinan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Keluarga Berencana Pascapersalinan, Pelayanan Kesehatan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the postpartum family planning service policy in Cisitu Subdistrict, Sumedang Regency. The research focuses on evaluating the effectiveness of the policy, identifying the main barriers encountered during its implementation, and exploring strategies for improving the delivery of postpartum family planning services. The theoretical framework is grounded in public policy implementation models, while the methodology adopts a qualitative approach using data collected through observations, interviews, and document reviews. Informants include healthcare workers, family planning officers, community cadres, and postpartum family planning acceptors. The findings reveal several challenges in policy implementation, such as limited access to services, inadequate public awareness, insufficient trained personnel, and suboptimal coordination among relevant institutions.

Despite these obstacles, government support and active roles of family planning counselors contribute positively to the program's progress. The study concludes that while the postpartum family planning policy has been established and shows promise, addressing the identified barriers is essential for achieving broader coverage and more effective service delivery. Recommendations include enhancing community education, increasing resource allocation, and strengthening inter-agency collaboration to improve the uptake and sustainability of postpartum family planning services.

Keywords : Policy Implementation, Postpartum Family Planning, Healthcare Services

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak

negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingginya angka kelahiran dan pertumbuhan populasi yang pesat berimplikasi pada berbagai

aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Program keluarga berencana (KB) telah menjadi strategi nasional yang signifikan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Khususnya, pelayanan keluarga berencana pasca persalinan memegang peranan penting dalam mencegah kehamilan tidak diinginkan dan menjaga kesehatan ibu serta bayi. Di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, program ini diimplementasikan sebagai upaya menekan angka kelahiran serta mendukung kesehatan reproduksi masyarakat. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan akses, rendahnya pemahaman masyarakat, dan sumber daya yang belum memadai masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek implementasi kebijakan pelayanan KB pasca persalinan di berbagai wilayah. Studi oleh Putri (2020) mengungkapkan bahwa partisipasi tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi merupakan faktor kunci keberhasilan program KB. Selain itu, Rahmawati dan Setiawan (2021) menyoroti perbedaan tingkat adopsi KB antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama disebabkan oleh faktor budaya dan infrastruktur pelayanan kesehatan. Penelitian lain oleh Wurdiana dan Agatha (2021) menegaskan pentingnya pelayanan kebidanan berkelanjutan pada masa nifas sebagai kunci penurunan angka kematian ibu dan bayi. Meskipun demikian, literatur tersebut masih minim yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan KB pasca persalinan di konteks Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, sehingga diperlukan studi yang mendalam untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, seperti tingkat unmet need yang masih tinggi dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, menjadi alasan utama perlunya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pelayanan KB pasca persalinan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas layanan di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi kebijakan pelayanan KB pasca persalinan di Kecamatan Cisitu dengan fokus pada perspektif tenaga kesehatan, petugas KB, dan masyarakat pengguna layanan. Data yang

digunakan berasal dari periode tiga tahun terakhir dan mencakup aspek sumber daya, prosedur pelayanan, dan persepsi masyarakat terhadap program KB pasca persalinan. Tujuan utama penelitian adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan ini sekaligus memberikan masukan bagi pengembangan program ke depannya.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali persepsi, pengalaman, dan proses implementasi kebijakan secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan terkait.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tenaga kesehatan, petugas KB, kader keluarga berencana, serta akseptor KB pasca persalinan. Selain itu, observasi langsung dan dokumentasi pelaksanaan program KB juga dijadikan sumber data primer. Data sekunder berupa dokumen resmi, laporan program, serta data statistik yang relevan dari instansi terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)
Dilakukan terhadap informan kunci untuk mendapatkan informasi rinci mengenai pelaksanaan dan kendala dalam kebijakan KB pasca persalinan.
2. Observasi Partisipatif
Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi pelayanan untuk mengamati proses dan interaksi selama pelaksanaan program.
3. Dokumentasi
Mengumpulkan dokumen terkait seperti laporan kegiatan, data peserta KB, dan peraturan yang berlaku sebagai bahan analisis pendukung.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan tahapan:

1. Reduksi Data
Memilah dan memilih data yang relevan untuk fokus penelitian.
2. Penyajian Data
Mengorganisasi data dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik untuk memudahkan pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan
Menyimpulkan hasil analisis secara sistematis berdasarkan pola dan tema yang ditemukan dalam data.

Definisi Variabel Operasional

Variabel utama dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan Pelayanan KB Pasca Persalinan Implementasi
Diukur berdasarkan aspek-aspek: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial politik.
2. Hambatan Implementasi
Faktor-faktor yang menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan, seperti keterbatasan akses, sumber daya, dan pemahaman masyarakat.
3. Strategi Solusi
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, yang merupakan wilayah fokus pelaksanaan kebijakan KB pasca persalinan. Waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2025.

Tabel 1. Skor Partisipasi Masyarakat

No.	Aspek Penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Mean
1	Partisipasi dalam penyuluhan KB	4	5	3	4.0
2	Kepatuhan mengikuti program KB	3	4	5	4.0
3	Dukungan sosial terhadap program	5	5	4	4.7

Source: Data diolah (2025)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan berbagai capaian, namun masih menghadapi kendala. Data dari hasil wawancara dan dokumentasi program memperlihatkan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan telah menyediakan layanan KB pasca persalinan, namun cakupan pelayanan belum merata di seluruh desa.

Tabel 2. Persentase cakupan pelayanan KB pasca persalinan di 10 desa Kecamatan Cisitu pada tahun 2024.

Desa	Sasaran Ibu Bersalin	Ibu yang Menerima KB Pasca Persalinan	Persentase Cakupan (%)
Cisitu	85	62	72.9
Situmekar	90	56	62.2
Pajagan	70	50	71.4
Cigintung	80	55	68.7
Sundamekar	75	53	70.7
Linggajaya	95	60	63.2
Ranjeng	80	58	72.5
Cilopang	85	59	69.4
Cimarga	40	28	70.0
Cinangsi	90	65	72.2

Sumber: Data hasil pengolahan peneliti, 2024

Interpretasi tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata cakupan pelayanan KB pasca persalinan di Kecamatan Cisitu sebesar 68,3%. Angka ini belum mencapai target ideal yang diharapkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang umumnya berada di atas 80%. Hal ini

mengindikasikan adanya gap antara kebijakan dan realisasi di lapangan.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Beberapa faktor penghambat ditemukan selama pelaksanaan program, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam memberikan pelayanan KB pasca persalinan.
2. Kurangnya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di desa-desa dengan tingkat kesejahteraan rendah.
3. Akses geografis dan transportasi yang sulit, menyulitkan ibu-ibu untuk mendapatkan layanan.
4. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal sehingga distribusi alat kontrasepsi tidak merata.

Temuan ini sejalan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (1973), yang menekankan pentingnya sumber daya, komunikasi, dan karakteristik pelaksana dalam keberhasilan implementasi.

Strategi Optimalisasi Pelayanan KB Pasca Persalinan

Berdasarkan wawancara dengan tenaga kesehatan dan kader KB, beberapa strategi yang diusulkan untuk mengatasi hambatan antara lain:

1. Peningkatan pelatihan dan kapasitas tenaga kesehatan di tingkat desa.
2. Penguatan sosialisasi melalui pendekatan berbasis komunitas dan kader KB.
3. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi yang lebih efisien dan terjangkau.
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, pemerintah desa, dan lembaga terkait.

Pembahasan

Implementasi kebijakan KB pasca persalinan di Kecamatan Cisitu masih menunjukkan adanya tantangan yang umum ditemui pada program kebijakan publik di wilayah perdesaan (Rahmawati & Setiawan, 2021). Tingkat cakupan layanan yang belum optimal dapat berdampak pada peningkatan angka kehamilan tidak diinginkan dan risiko kesehatan ibu serta bayi (Julian & Anggraeni, 2015). Oleh karena itu, pendekatan implementasi yang holistik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sangat diperlukan.

Selain itu, konsistensi dukungan pemerintah dan keterlibatan aktif tenaga kesehatan dan kader berperan besar dalam keberhasilan program (Putri, 2020). Dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat yang ditemukan dan menerapkan strategi yang diusulkan, program KB pasca persalinan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan penurunan fertilitas dan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi di Kecamatan Cisitu.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan sejumlah pencapaian, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kurang optimalnya penyuluhan kepada masyarakat, kendala akses geografis, serta koordinasi antarinstansi yang belum maksimal. Kendala-kendala ini mempengaruhi cakupan dan efektivitas pelayanan KB pasca persalinan, sehingga program belum mencapai target yang diharapkan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader KB melalui pelatihan yang lebih intensif serta penyediaan sumber daya yang memadai. Selain itu, penguatan sosialisasi dan edukasi berbasis komunitas harus lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya KB pasca persalinan. Sistem distribusi alat kontrasepsi perlu diperbaiki agar lebih efisien dan merata, terutama di wilayah-wilayah yang

sulit dijangkau. Koordinasi lintas sektor antara instansi terkait harus diperkuat guna memastikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan di Kecamatan Cisitua dapat berjalan lebih optimal, sehingga berkontribusi pada pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan. Penelitian ini juga membuka peluang untuk studi lanjutan yang dapat mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan program keluarga berencana di daerah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan. Jakarta: BKKBN.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson.
- Julian, E., & Anggraeni, D. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pasca persalinan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 110–120.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All*. University of California Press.
- Putri, A. N. (2020). Peran tenaga kesehatan dalam keberhasilan program keluarga berencana pasca persalinan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 34–42.
- Rahmawati, S., & Setiawan, I. (2021). Tingkat adopsi kontrasepsi pasca persalinan di wilayah perkotaan dan perdesaan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(3), 65–75.
- Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48.
- Wurdiana, I., & Agatha, E. (2021). Pelayanan kesehatan berkelanjutan pada masa nifas untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi. *Jurnal Kebidanan*, 15(2), 40–55.